

Sektor Potensial sebagai *Backbone* pada Kabupaten Berbasis Sektor Pertambangan di Kalimantan Selatan

Muzdalifah* , Syahrituah Siregar, Ayu Fitriani, dan Norlatifah

Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin

*Corresponding Email: muzdalifah.feb@ulm.ac.id

Received: 17th April 2025; Last Revised: 26th April 2025; Accepted: 26th April 2025

Available Online: 26th April 2025; Published Regularly: March 2025



Abstract

*This study identifies potential economic sectors as key drivers in mining-based regencies of South Kalimantan by analyzing inter-sectoral linkages (forward-backward linkages), value-added, and economic impacts. Using Input-Output analysis and Klassen typology on 2016 data covering 17 sectors, the study identifies leading sectors capable of driving economic growth amid declining contributions from the extractive sector. The results highlight Processing Industry, Waste Management, Information/Communication, Accommodation, and Real Estate as key sectors with varying dominance across regencies: Tanah Bumbu (Processing, Waste, Information), Kotabaru (Processing, Waste, Accommodation, Real Estate), and Balangan and Tabalong (Processing, Waste, Information, Accommodation, Real Estate). **The novelty of this research** lies in combining Input-Output and Klassen analyses to integrate linkages with income-output multiplier effects, providing accurate policy recommendations for inclusive post-mining economic development.*

Keywords: IO Model Analysis, Forward and Backward Linkages, Multiplier, and Quadrant Analysis

JEL Classifications: R11, C67, and O13

 <https://doi.org/10.14710/djoe.50670>

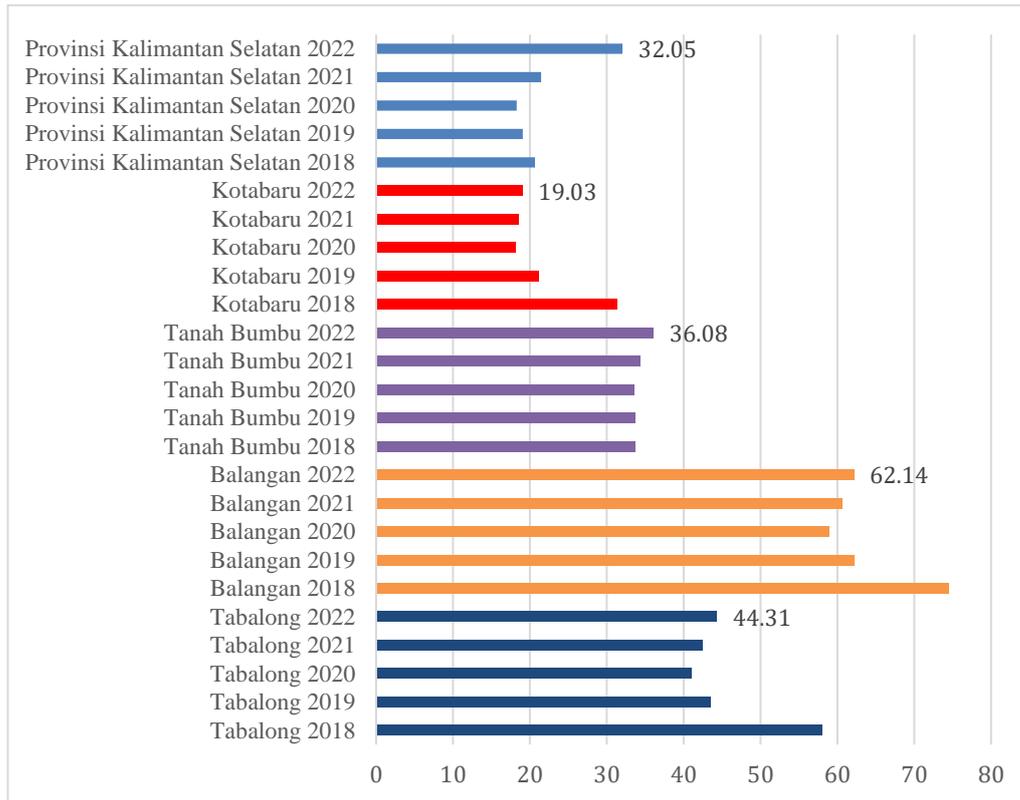


[This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Faculty of Economics and Business, Universitas Diponegoro

Pendahuluan

Perekonomian Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha sangat bergantung kepada sektor pertambangan dan galian. Ada 13 kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan 4 diantaranya merupakan kabupaten yang perekonomiannya mengandalkan pertambangan dan galian, 4 kabupaten tersebut merupakan daerah kontributor terbesar dalam perekonomian provinsi dari sektor pertambangan dan galian. Kabupaten dengan sektor andalan pertambangan dan galian adalah Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong.



Gambar 1. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Galian

Sumber: BPS Kalsel.

Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan cukup lama berdasarkan peraturan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban secara otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kondisi ini mengharuskan daerah untuk menemukan sumber penerimaan daerah yang bisa dijadikan sebagai penopang bagi daerah, sehingga terkadang ada daerah yang melakukan eksploitasi secara berlebihan dan justru merusak lingkungan.

Indonesia sebagai bagian dari negara anggota PBB yang berdasarkan agenda 2030, bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable Development Goal (SDGs) terkait dengan tujuan ke 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan pekerjaan yang layak, yang juga berkorelasi atas pencapaian SDGs No. 1 yaitu tidak ada kemiskinan yaitu mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan disemua tempat. Pada Point 4 tentang memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara- negara maju (Pahlephi, 2022).

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah sangat bergantung pada perencanaan pembangunan daerah, yang dirancang dalam segenap program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan, karena perencanaan pembangunan merupakan pedoman yang dapat menentukan arah pelaksanaan Pembangunan secara

lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang tersedia, sehingga mampu menghadapi masalah-masalah dan tantangan sebagai konsekuensi perubahan yang dinamis dalam masyarakat suatu negara. Kerentanan harga komoditas batubara sebagai penyumbang terbesar di lapangan usaha pertambangan dan galian, menjadi sinyal buat daerah terutama 4 kabupaten yang perekonomiannya sangat didominasi oleh peran sector tersebut sehingga sangat penting untuk menurunkan scope wilayah provinsi pada level kabupaten, dan sebagai langkah awal dilakukan terhadap kabupaten yang perekonomiannya berbasis pada pertambangan dan galian, dan semoga tahun berikutnya bisa dilanjutkan untuk kabupaten lainnya, sehingga kajian ini dilakukan secara komprehensif dan sangat berguna untuk daerah.

Kecenderungan harga komoditas batubara yang terus menurun membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian Kalimantan Selatan, besarnya peran sektor pertambangan dan penggalian ini harus mulai di reorientasi mengingat ketidakpastian harga dipasar global menjadikan sektor ini tidak bisa dijadikan sebagai andalan buat daerah termasuk kabupaten yang berbasis pada pertambangan dan penggalian, selain itu dari sisi isu lingkungan juga menjadi sorotan terutama setelah terjadi musibah banjir. Berdasarkan citra satelit radar menunjukkan luas wilayah yang tergenang sekitar 164.090 Ha, banjir ini menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terjadi akibat curah hujan ekstrem dan penurunan tutupan lahan vegetasi (kerapatan tinggi/hutan) terutama di daerah hulu yang menjalankan fungsi penyimpanan air (Wuragil, 2021). Kondisi ini mengharuskan daerah khususnya di 4 kabupaten tersebut untuk menyiapkan *leading sector* yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan sektor terkait baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*) yang bisa memberikan efek *multiplier output*, dalam upaya pencapaian SDGs No. 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan pekerjaan yang layak, yang juga berkorelasi atas pencapaian SDGs No. 1 yaitu tidak ada kemiskinan yaitu mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan disemua tempat. tentunya penguatan kelembagaan dalam penetapan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis riset.

Kebaharuan dari riset ini adalah selain menggunakan hasil olah data dengan analisis *Input Output*, juga ditambahkan analisis tipologi Klassen dalam pengambilan keputusan menentukan sector yang dijadikan sebagai penopang perekonomian daerah. Alat analisis ini digunakan sebagai sarana untuk menggabungkan hasil *backward* dan *forward linkage*, serta *multiplier* efek pendapatan dan *output*. Hasil analisis ini tentunya bisa lebih memastikan para pengambil kebijakan di daerah tentang kemampuan sektor ini jika dijadikan sebagai penopang perekonomian daerah yang menjadi lokus penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menurut Hutabarat (2020) merupakan indikator penting daerah yang mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan guna penentuan arah pembangunan dimasa mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target utama penyusunan rencana pembangunan daerah. Sumber daya dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi terbatas sehingga suatu wilayah harus menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi dengan potensi ekonomi yang dimiliki

masing-masing daerah, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penentu dalam proses pembangunan daerah serta memiliki implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama pertumbuhan untuk menjelaskan suatu daerah tumbuh dengan cepat ataupun lambat disertai dengan faktor-faktor utama yang menentukannya (Syafrizal, 2008).

Pembangunan tidak hanya tentang kemampuan mencapai suatu Tingkat pertumbuhan tertentu namun juga tentang perkembangan kesejahteraan dimana pembangunan ekonomi suatu negara dapat dicapai akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan Malthus dalam Jhingan (2016). Untuk mencapai itu semua menurut Mill dalam (Jhingan, 2016) peningkatan kesejahteraan hanya mungkin terjadi jika tanah serta modal sebagai faktor produksi mampu meningkatkan produk lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan angkatan kerja, untuk itu peranan sektor kunci menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Peranan sektor unggulan dalam suatu perekonomian sangat penting seperti yang dikemukakan oleh Sjafrizal dalam Mansyur dan Utomo (2021) tentang sektor potensial merupakan sektor pemimpin sekaligus penggerak utama perekonomian daerah. Sektor potensial dapat pula dianggap sebagai sektor kunci perekonomian. Sektor potensial ialah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah sebab memiliki *competitive advantage* yang relatif tinggi (Negara & Putri, 2020). Sektor potensial dikembangkan dengan tujuan menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sektor potensial mampu memenuhi permintaan dalam daerah serta dari luar daerah. Sektor potensial akan berkembang lebih lanjut melalui investasi serta dapat menjadi tumpuan kegiatan perekonomian (Adawiah & Wardhana, 2021). Sektor unggulan dapat digunakan dalam meningkatkan kecepatan pertumbuhan ekonomi daerah (Kesuma & Utama, 2015).

Ada syarat suatu sektor ekonomi untuk menjadi sektor potensial sebagaimana yang pendapat Rachbini dalam Nurlina et al. (2019) tentang empat syarat agar suatu sektor dapat menjadi sektor potensial daerah, yaitu:

- a) Sektor tersebut harus menghasilkan produk dengan permintaan relatif besar hingga laju pertumbuhan mampu berkembang cepat.
- b) Terdapat perubahan teknologi maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
- c) Terjadi peningkatan investasi dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi unggulan.
- d) sektor tersebut harus berkembang sehingga dapat memberikan dampak terhadap sektor-sektor lainnya.

Penggunaan tabel IO untuk menentukan *leading sector* dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya diantaranya Valadkhani (2003) mengidentifikasi *leading sector* dalam penyerapan tenaga kerja di Australia dengan menggunakan model I-O melalui dua pendekatan. Pertama, kontribusi langsung dan tidak langsung suatu sektor diukur melalui pendekatan kerugian atau penutupan suatu industri. Kedua, sektor penting yang menyerap tenaga kerja diidentifikasi berdasarkan besarnya elastisitas lapangan kerja sectoral. Hasil temuannya menunjukkan bahwa sektor manufaktur sangat penting berkontribusi secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian. Sektor penting lainnya yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan ritel, sektor konstruksi, sektor

kesehatan dan layanan masyarakat, sektor properti dan jasa bisnis, dan sektor pendidikan. Magacho et al. (2019) menganalisis *leading sector* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dan China). Dengan menggunakan model I-O, *multiplier output* sektoral, indeks keterkaitan Rasmussen-Hirschman, dan indeks keterkaitan ke depan dan ke belakang yang dinormalisasi (*pure normalized*) dihitung untuk menentukan *leading sector*. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sektor manufaktur yang dinamis berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sektor pertanian dan sektor komoditas mineral merupakan sektor yang berperan paling rendah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, analisis keterkaitan ke belakang menunjukkan bahwa di semua negara BRIC, sektor bahan kimia, sektor transportasi, sektor produk logam, dan sektor makanan dan minuman memiliki potensi yang signifikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk analisis keterkaitan ke depan menunjukkan bahwa sektor mineral bukan logam, sektor komoditas mineral, sektor utilitas, sektor kimia dan sektor minyak bumi memiliki kapasitas terbesar untuk memasok input ke sektor lainnya.

Kasus Indonesia penggunaan IO sebagai alat untuk menentukan sektor kunci juga telah banyak dilakukan seperti Lestari dan Sahara (2015) menganalisis *leading sector* dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sektor kehutanan merupakan *leading sector* terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh. Namun, jika dilihat dari sisi *output*, pendapatan, dan tenaga kerja sektor yang menjadi *leading sector* adalah sektor industri pengolahan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Aceh sebaiknya mengembangkan sektor industri pengolahan yang menggunakan *output* sektor kehutanan sebagai input pada sektor tersebut.

Hilman dan Ester (2018) menggunakan Tabel *Input-Output* Indonesia 2015 dengan klasifikasi 17 sektor untuk melihat peran industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa analisis keterkaitan sektor manufaktur memiliki keterkaitan ke depan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan keterkaitan ke belakang, serta industri manufaktur memiliki keterkaitan langsung ke depan tertinggi ke sektor konstruksi dan industri manufaktur memiliki hubungan terbelakang langsung tertinggi ke sektor industri yang memproses itu sendiri. Pada nilai koefisien sebaran diperoleh bahwa sektor industri pengolahan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor hulu dan pada indeks sensitivitas penyebaran menunjukkan hasil sektor industri pengolahan juga mampu meningkatkan pertumbuhan di sektor hilir. Dari sisi pengganda tenaga kerja, Secara keseluruhan jika permintaan akhir sektor industri pengolahan dinaikkan sebesar 1% maka akan meningkatkan total kesempatan kerja Indonesia pada tahun 2010 sebesar 202.860 orang atau meningkat sebesar 1.278% dari jumlah sebelumnya.

Metode Penelitian

Cakupan penelitian ini adalah menentukan *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, mengukur keterkaitan antar sektor, dan mengestimasi besarnya *multiplier effect* (*output* dan pendapatan) dengan menggunakan tabel input *output* (modifikasi untuk kabupaten) karena ketersediaan data untuk level kabupaten tidak ada, karena data sekunder terbatas, perlu dilakukan proses disagregasi pada ke 4 kabupaten

tersebut, dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, data kemudian dianalisis menggunakan tabel IO.

Tabel *Input Output* (I-O) merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011). Oleh karena itu Tabel I-O merupakan sebuah model kuantitatif yang menunjukkan potret keadaan ekonomi (*Economics Landscape*) suatu wilayah pada suatu periode tertentu (tahun).

Dari analisis *input-output* dapat dihitung angka pengganda *output*, angka pengganda pendapatan rumah tangga, dan angka pengganda kesempatan kerja. Untuk menghitung angka *multiplier* atau pengganda *output* diperoleh dengan rumus:

$$M_o = (I - A)^{-1} \quad (1)$$

di mana:

M_o = matriks *multiplier*/pengganda *output* berukuran $n \times n$;

I = matriks identitas berukuran $n \times n$

A = matriks koefisien teknis berukuran $n \times n$

$B = [I-A]^{-1}$ = matriks kebalikan Leontief

Matriks kebalikan Leontief $[I-A]^{-1}$ adalah matriks *multiplier*/pengganda *output*. Untuk mendapatkan angka pengganda pendapatan pekerja:

$$M_I = \widehat{V}_{201}[I - A]^{-1} \quad (2)$$

Pendapatan pekerja

$$V_{201} = M_I \cdot F = \widehat{V}_{201}[I - A]^{-1} \cdot F \quad (3)$$

di mana:

\widehat{V}_{201} = matriks diagonal koefisien nilai upah dan gaji

V_{201} = vektor pendapatan pekerja, dimensi $n \times 1$

M_I = matriks pengganda mendapatkan pendapatan pekerja

$[I - A]^{-1}$ = matriks kebalikan Leontief

Angka Pengganda Pendapatan (*Income Multiplier*) Pekerja sektoral:

$$I_m = \widehat{V}_{201}[I - A]^{-1} \cdot \widehat{V}_{201}^{-1} \quad (4)$$

Untuk menghitung angka pengganda atau dampak kesempatan kerja sebagai berikut:

$$\text{Koefisien Tenaga Kerja, } l_j = \frac{TK_j}{X_j} \quad (5)$$

di mana:

l_j = koefisien tenaga kerja

TK_j = jumlah tenaga kerja di sektor j

X_j = nilai *output* atau nilai produksi sektor j

Untuk mendapatkan kembali angka TK_j , jika X_j sdh diketahui $TK_j = l_j \times X_j$, sehingga sekarang kita memiliki kumpulan l_j sebanyak n (banyak sektor dalam Tabel IO), yang kemudian ditempatkan ke dalam matrik diagonal.

Hasil dan Pembahasan

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan pada 4 kabupaten yang perekonomiannya daerahnya didominasi oleh sektor pertambangan yaitu Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan dan Tabalong, sehingga diketahui sektor yang bisa dijadikan sebagai backbone untuk menggantikan sektor yang selama ini menjadi andalan di ke 4 kabupaten tersebut.

Hasil analisis keterkaitan ke depan (*forward linkage*) untuk Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan dan Tabalong relative sama yaitu sektor (K) Jasa Keuangan dan Asuransi, (D) Pengadaan Listrik dan Gas, (L) Real Estate, dan (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Dan (J) Informasi dan Komunikasi, dan sektor lainnya hanya di Kabupaten Kotabaru yang berbeda yaitu (R,S,T,U) Jasa lainnya.

Hasil analisis keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, dan Tabalong dengan 3 sektor utamanya relatif sama yaitu, sektor (D) Pengadaan Listrik dan Gas, (C) Industri Pengolahan dan (I) Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. sektor lainnya yang masuk dalam analisis ini di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sektor (B) Pertambangan dan Penggalian dan (H) Transportasi dan Pergudangan. Kabupaten Kotabaru sektor (F) Konstruksi dan (B) Pertambangan dan Penggalian. Kabupaten Balangan sektor (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kabupaten Tabalong sektor (J) Informasi dan Komunikasi dan (F) Konstruksi.

Kondisi yang relatif sama pada ke 4 wilayah sebagai lokus dari penelitian ini mengindikasikan, bahwa pada daerah yang memiliki potensi ekonomi yang relatif sama maka sektor ekonomi pendukungnya juga tidak jauh berbeda, sehingga dukungan sektor ekonomi dalam analisis *forward* dan *backward linkage* ini akan sangat penting mengingat sektor dalam analisis *forward linkage* adalah sektor yang akan memanfaatkan sektor unggulan sebagai factor input dan analisis *backward linkage* akan menjadi supplier dalam pengembangan sektor ekonomi yang menjadi sektor kunci nantinya.

Temuan Raflah dan Widodo (2016) mengenai perekonomian Provinsi Riau pada tahun 2010 berdasarkan kontribusi *output*, permintaan antara, permintaan akhir, dan nilai tambah bruto menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Riau didominasi oleh sektor pertambangan minyak dan gas. Namun, sektor industri makanan, minuman, dan tembakau; sektor perdagangan; sektor industri pulp, kertas, dan percetakan; sektor kehutanan; serta sektor karet juga merupakan sektor-sektor kunci dalam perekonomian Provinsi Riau di luar sektor minyak dan gas. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak daerah telah mempertimbangkan untuk mengubah struktur ekonomi mereka dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai sektor utama perekonomian.

Menurut Sahara (2017), *multiplier output* ini menunjukkan besar perubahan aktivitas suatu sektor yang akan mempengaruhi tingkat *output* dari sektor-sektor lain. Hal ini berarti semakin besar nilai *multiplier output* berarti semakin besar perubahan aktivitas di suatu sektor akan mempengaruhi tingkat *output* sektor lainnya, sektor lainnya itu bisa dilihat dari keterkaitan sektor ke depan maupun ke belakang.

Hasil pengolahan data dengan IO untuk mendapatkan *multiplier output* diketahui berdasarkan data IO tahun 2016 diketahui 3 sektor/lapangan usaha yang memiliki *multiplier output* yang paling besar dari 4 Kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, dan Tabalong sektornya relatif sama yaitu (D) Pengadaan Listrik dan Gas,

(C) Industri Pengolahan dan (I) Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum, sektor lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu adalah (B) Pertambangan dan Penggalian dan (F) Konstruksi. Kabupaten Kotabaru (F) Konstruksi dan (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kabupaten Balangan (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Kabupaten Tabalong (J) Informasi dan Komunikasi dan (F) Konstruksi.

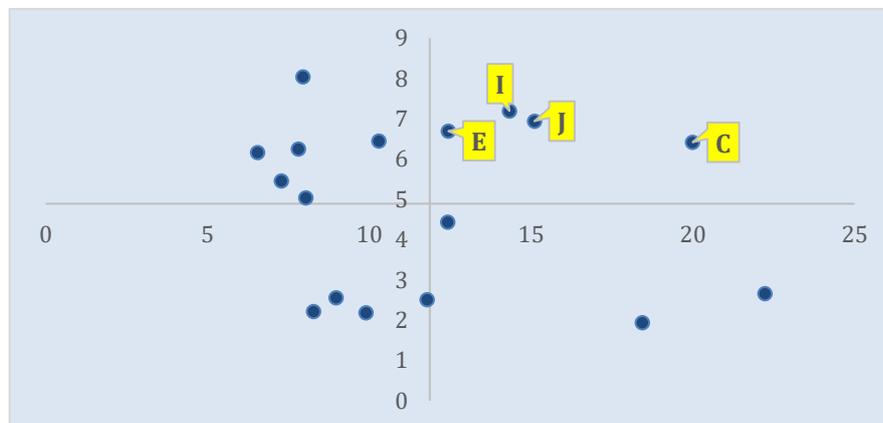
Angka pengganda pendapatan menunjukkan peningkatan pendapatan akibat adanya perubahan *output* dalam perekonomian (Sahara, 2017), semakin tinggi angka penggandanya maka semakin besar peningkatan pendapatan jika terjadi perubahan *output* dalam perekonomian. Angka pengganda pendapatan type I adalah jumlah efek awal ditambah efek putaran pertama ditambah efek dukungan industri dibagi efek awal. Angka pengganda type II jumlah efek awal ditambah efek putaran pertama ditambah efek dukungan industri ditambah efek induksi konsumsi dibagi efek awal (Sahara, 2017).

Hasil pengolahan data dengan IO untuk mendapatkan *multiplier* pendapatan diketahui berdasarkan data IO tahun 2016 diketahui 3 sektor/lapangan usaha yang memiliki *multiplier* pendapatan yang paling besar dari 4 Kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Balangan, dengan sektor yang relatif sama yaitu, sektor (O) Adminstrasi pemerintahan, pertahanan dan Jaminan sosial wajib, (L) Real Esstate, dan (C) Industri Pengolahan, sedangkan di Kabupaten Tabalong yang berbeda hanya sektor (I) Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum.

Penentuan sektor potensial dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kuadran berdasarkan tipologi Klassen berdasarkan pertimbangan angka keterkaitan *forward* dan *backward linkage* serta angka *multiplier output* dan pendapatan sebagai *backbone* bagi perekonomian daerah. Keterkaitan sektor tersebut dengan sektor-sektor lainnya besar dan efek *multiplier output* serta pendapatan maka kebijakan yang ditujukan pada sektor-sektor potensial tersebut dapat menghemat biaya pembangunan.

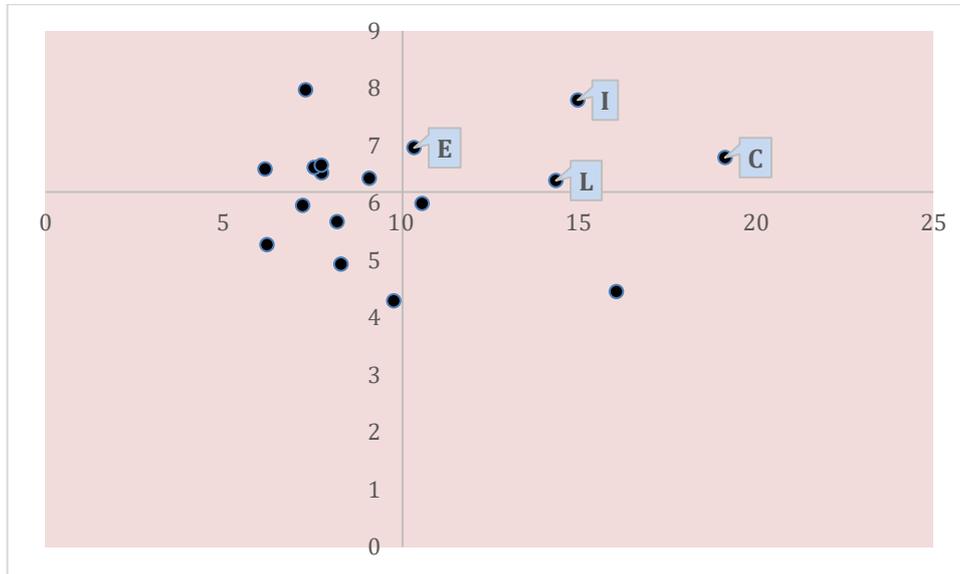
Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan temuan Manulang (2009) bahwa perlu solusi mengurangi ketergantungan terhadap tambang dengan melakukan transformasi struktur ekonomi dan Peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran dengan tepat dan saran tentang pentingnya kerjasama antar daerah dalam memperbaiki dan mempertahankan kinerja Pembangunan.

Hasil analisis kuadran di Kabupaten Tanah Bumbu adalah (C) Industri Pengolahan, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (J) Informasi dan Komunikasi, seperti terlihat pada kuadran I di Gambar berikut:



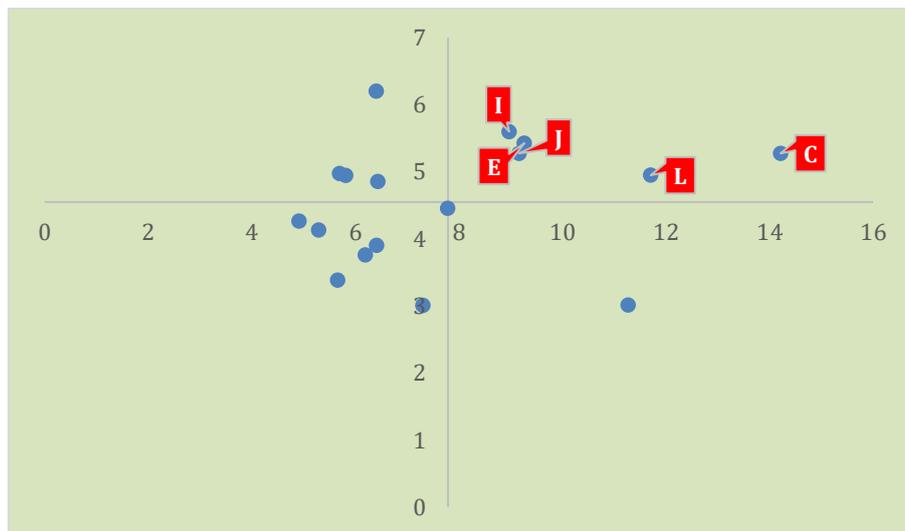
Gambar 2. Analisis Kuadran Sektor Backbone di Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Kotabaru adalah (C) Industri Pengolahan, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (L) Real Estate, seperti terlihat pada kuadran I di Gambar berikut:



Gambar 3. Analisis Kuadran Sektor Backbone di Kabupaten Kotabaru

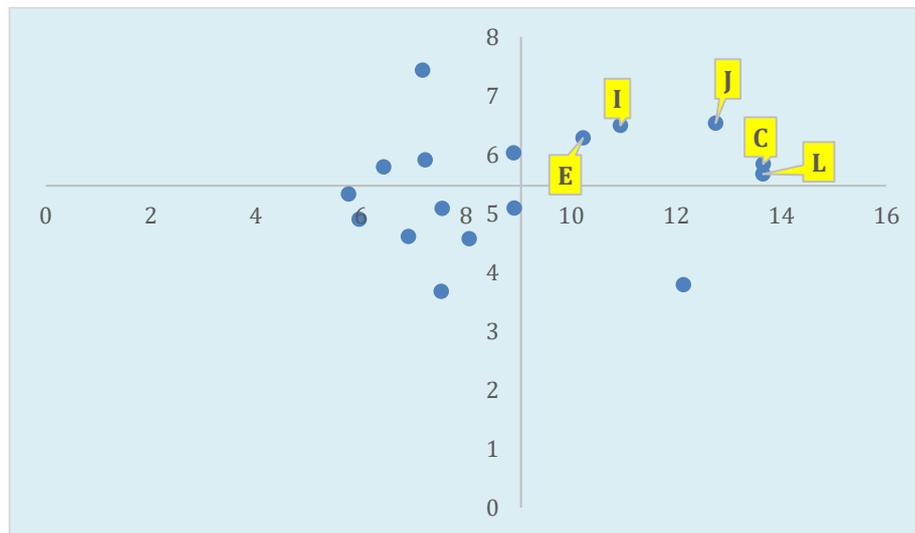
Kabupaten Balangan adalah (C) Industri Pengolahan, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (J) Informasi dan Komunikasi, (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan (L) Real Estate, seperti terlihat pada kuadran I di Gambar berikut:



Gambar 4. Analisis Kuadran Sektor Backbone di Kabupaten Balangan

Kabupaten Tanah Laut adalah (C) Industri Pengolahan, (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (J) Informasi dan Komunikasi, (I)

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan (L) Real Estate, seperti terlihat pada kuadran I di Gambar berikut:



Gambar 5. Analisis Kuadran Sektor Backbone di Kabupaten Tanah Laut

Temuan penelitian ini menjawab kekhawatiran tentang dampak ekstraksi sektor pertambangan dalam perekonomian berdasarkan hasil temuan Rosy (2023) menunjukkan bahwa mengekstraksi sektor pertambangan batubara di Provinsi Jambi bukan menjadi penyebab terbesar turunnya *output* ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong isu ekonomi hijau sebagai bagian dari pencapaian dari *Sustainable Development Goal*.

Kesimpulan

Melalui analisis keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) serta memiliki efek *multiplier output* dan pendapatan yang tinggi dari 4 Kabupaten yang perekonomiannya berbasis sektor Pertambangan dan penggalian dapat mengekstraksi sektor tersebut ke sektor lainnya, sehingga dengan keterbatasan dana untuk melakukan pembangunan di setiap daerah dapat lebih efisien. Implikasi hasil penelitian ini terhadap pencapaian SGD's juga akan sangat signifikan mengingat basis perekonomian diarahkan untuk beralih pada sektor non fosil, selain itu juga efisiensi anggaran akan berdampak pada semakin banyak aktivitas perekonomian lainnya yang juga bisa dilakukan.

Sektor prioritas sebagai backbone bagi perekonomian daerah masing-masing. Kabupaten Tanah Bumbu sektor prioritasnya adalah (C) Industri Pengolahan dan dan (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kabupaten Kotabaru sektor prioritasnya adalah (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kabupaten Balangan sektor yang dapat dijadikan prioritas adalah sektor (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kabupaten Tabalong adalah sektor ((I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan (J) Informasi dan Komunikasi.

Referensi

- Adawiah, R., & Wardhana, A. (2021). Analisis kompetitif dan spesialisasi sektor unggulan di Kabupaten Kotabaru. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(2), 406–418. <https://doi.org/10.20527/jiep.v4i2.4398>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2011). *Tabel input output 2010 Kalimantan Selatan*.
- Hilman, A. M., & Ester, M. A. (2018). Peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian indonesia: Model input-output. *Media Ekonomi*, 26, 63–76. <http://dx.doi.org/10.25105/me.v26i1.5210>
- Hutabarat, R. Y. (2020). Penentuan sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 95–110. <https://doi.org/10.33059/jseb.v11i1.1790>
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Kesuma, N. L. A., & Utama, I. M. S. (2015). Analisis sektor unggulan dan pergeseran pangsa sektor-sektor ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 100–107.
- Lestari, & Sahara. (2015). *Analisis leading sector dan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh*.
- Magacho, G. R., Marconi, N., & Rocha, I. (2019). Leading sectors and structural dynamics: An input-output analysis contrasting the BRICs growth paths. *Brazilian Keynesian Review*. <https://doi.org/10.33834/bkr.v4i2.127>
- Mansyur, A. I., & Utomo, A. P. (2021). Penerapan model regresi data panel: Determinan PDRB sektor unggulan di Provinsi Riau tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics 2021*, 421–430. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.899>
- Manulang, L. (2009). Model pembangunan daerah berkelanjutan melalui transformasi struktur ekonomi berbasis sumberdaya pertambangan ke sumberdaya lokal terbarukan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 16(3). <https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/18703>
- Negara, A. K. K., & Putri, A. K. (2020). Analisis sektor unggulan Kecamatan Toboali dengan metode shift share dan location quotient. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 24–36. <https://doi.org/10.33019/equity.v8i1.11>
- Nurlina, Andiny, P., & Sari, M. (2019). Analisis sektor unggulan Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 23–37. <https://doi.org/10.33059/jseb.v10i1.1122>
- Pahlephi. (2022, December 7). *SDGs adalah: Pengertian dan 17 tujuannya bagi kesejahteraan dunia*. Detik. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6448066/mengenai-sdgs-adalah-dan-tujuan-di-balikny>
- Raflah, J. W., & Widodo, T. (2016). Identifikasi sektor ekonomi non-migas sebagai sektor kunci perekonomian Provinsi Riau menggunakan analisis tabel input output. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 4(1). <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/90>
- Rosy, T. (2023). Analisis dampak ekstraksi sektor pertambangan batubara Provinsi Jambi. *Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN)*, 6(2). <https://bpsjambi.id/median/index.php/median/article/view/88>
- Sahara. (2017). *Analisis input output* (Sari Atika Mayang, Ed.). IPB Press.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi regional teori dan aplikasi*.



- Valadkhani, A. (2003). Using Input-Output Analysis to Identify Australia's High Employment Generating Industries. *Australian Bulletin of Labour*, 29(3), 199–219.
- Wuragil, Z. (2021, January). BPPT: Kerugian Banjir Kalimantan Selatan Lebih dari Rp 1,3 Triliun. *Tempo*.